



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta, Telepon (0274) 512386, Faksimili (0274) 560386

Website: www.dislautkan.jogjaprov.go.id, Email: dislautkan@jogjaprov.go.id Kode Pos 55223

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 188 /

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis agar penyusunan Renstra berjalan efektif dan efisien.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4. Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;

6. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Pencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pada tahun 2018;
- KETIGA** : Menunjuk nama-nama sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Tahun 2017 - 2022;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dictum ketiga dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018

Kepala Dinas,


Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 188/
Tanggal : 1 Oktober 2018
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	R. Hery Sulistio H., S.Pi, MT	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Fitrianto Noorcahyo, S.Pi, M.Eng	Kasubbag Program dan Informasi	Sekretaris
4.	Roosmanto, S.Pi	Analisis Perencanaan Program Anggaran	Anggota
5.	Taufan Yudianto, S.Pi	Analisis Perencanaan Program Anggaran	Anggota
6.	Betty Rachmanti, S.Si, MT	Analisis Perencanaan Program Anggaran	Anggota
7.	Toto Warsito, ST	Analisis Perencanaan Program Anggaran	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018

Kepala Dinas,


Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001 



KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan kemudahan kepada Tim Penyusun Renstra untuk menyelesaikan dengan tepat waktu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 - 2022 ini.

Dalam penyusunan laporan ini kami tidak lepas dari mengacu pada PERMEN Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehingga pada penyusunan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku Renstra ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan serta isu strategis yang berkembang menjadikan penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran, kritik, dan masukan lain yang membangun sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat di dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 - 2022 baik pikiran, tenaga, dan waktu. Semoga laporan ini bisa dipakai sebagai bahan kajian atau informasi yang lain serta sebagai acuan kegiatan tahun yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Kepala

Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis-----	48
IV. TUJUAN DAN SASARAN -----	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD -----	50
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	51
5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD-----	51
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN -----	56
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN-----	77
VIII. PENUTUP -----	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY-----	26
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan -----	26
Tabel 3. Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan-----	27
Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur -----	28
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017 -----	31
Tabel 6. Realisasi Ketersediaan Ikan dan Angka Konsumsi Ikan-----	32
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017 -----	35
Tabel 8. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis,dan Indikator Sasaran-----	50
Tabel 9. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah -----	50
Tabel 10. Analisis SWOT -----	53
Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan -----	55
Tabel 12. Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY-----	59
Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta-----	60
Tabel 14. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD-----	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Target dan Realisasi Renstra 2012-2017	30
Gambar 2. Realisasi Produksi perikanan tangkap dan Budidaya	33
Gambar 3. Target dan Realisasi NTP Nelayan	34
Gambar 4. Grafik pencapaian kinerja Anggaran	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional di tingkat daerah. Kegiatan ini penting karena perencanaan strategis merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis merupakan sebuah petunjuk atau pedoman organisasi yang dapat digunakan untuk merencanakan tujuan dari kondisi saat ini menuju kondisi 5 tahun mendatang lengkap dengan perencanaannya, langkah-langkahnya serta pengukurannya. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Lebih spesifik tentang perencanaan, yang dimaksud dengan Rencana strategis Instansi (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi, yang disusun sesuai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) mengamanatkan, bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan paparan Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 pada saat penetapan Gubernur DIY tanggal 2 Agustus 2017 yang lalu, visi DIY ke depan adalah **Menyongsong “Abad Samudera Hindia” untuk kemuliaan**



martabat manusia Jogja.

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang, namun kemudian telah dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran sendiri armada-armada independen pedagang Jawa oleh Amangkurat I.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki garis pantai sepanjang sekira 113 kilometer (Data Vertikal Pangkalan TNI AL dalam <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku>). Pada garis pantai kawasan-kawasan di bagian selatan yang membentang dari Kulon Progo, Bantul sampai dengan Gunungkidul memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Ketiga kabupaten tersebut tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, Abad 21 merupakan Abad Samudra Hindia yang diyakini merupakan masa depan maritim yang strategis bagi Indonesia setelah era Samudra Atlantik (abad 19) dan Samudra Pasifik (abad 20) berlalu. Diyakini, separuh dari kapal kontainer dunia, sepertiga lalu lintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia yang menjadi tempat tinggal sekira 2,6 miliar jiwa dari berbagai bangsa yang membentang dari Asia Tenggara sampai dengan Afrika Selatan.

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kerjasama antara negara-negara Samudra Hindia tersebut telah terbentuk IORA (Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia, 1997) yang digagas Nelson Mandela pada tahun 1995. Negara-negara anggota IORA mencakup negara-negara ASEAN, Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Terkait dengan potensi strategis maritim tersebut, terdapat tantangan ke depan



dengan dibangunnya Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand). Terusan yang mirip dengan Suez dan Panama ini akan membuat sudetan pada leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China.

Dampak dari Kra-Canal terhadap peta intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II dapat berdampak pada meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Fenomena Kra-Canal perlu diantisipasi ke depan sebagai peluang Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata, maupun tantangan apabila terjadi perubahan lalu lintas pelayaran

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia". Misi tersebut adalah: 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing; 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan; 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan; 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang



Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan :

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi



SDM-DIY menyangsang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyangsang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyangsang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyangsang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi

Sebagai lembaga teknis dibidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dapat mengambil peran dalam pelaksanaan misi yang pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Dengan penekanan visi pada "Abad Samudera Hindia" hal ini berarti terdapat penekanan pembangunan DIY ke depan secara keseluruhan akan difokuskan pada wilayah kelautan dan sekitarnya. Posisi ini mempunyai konsekuensi pada pembangunan dengan basis kelautan dalam segala aspek, termasuk aspek perikanan dan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir. Visi dan Misi tersebut tentunya merupakan tantangan sekaligus peluang yang besar bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang ada di DIY. Kesempatan ini dapat menjadi pertimbangan penyusunan perencanaan strategis 5 tahun ke depan bagi lembaga



teknis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ini nantinya merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemda DIY tahun 2017-2022. Penyusunan dokumen Renstra ini, disamping berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, juga berdasarkan pada analisis lingkungan, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Isu-isu strategis dipetakan dan dianalisis SWOT untuk menentukan alternatif-alternatif strategi ke depan. Kemudian dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya tiap tahun sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2017-2022.

Renstra ini mempunyai fungsi penting sebagai pedoman pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun), yaitu Rencana Kerja Instansi, Rencana Kerja Anggaran serta untuk pedoman pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan acuan arah kebijakan dan tujuan instansi bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan selama tahun 2017-2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan efektif. Dokumen ini juga sebagai pengikat instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri antar bagian, karena instansi ini mempunyai tujuan dan sasaran yang bersumber dari visi dan misi yang sama. Sehingga semuanya terikat dalam wadah yang satu dan saling sinergi. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di DIY akan berjalan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan. Meskipun dokumen Renstra ini disusun sedemikian rupa pada saat ini, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalannya ke depan terjadi penyempurnaan atau perubahan. Hal ini disebabkan renstra merupakan *living document* yang sifatnya dinamis. Jika terjadi situasi baik internal maupun eksternal yang mengharuskan ada penyempurnaan, maka hal tersebut sangat mungkin dilakukan demi perencanaan yang lebih strategis dan pelaksanaan yang lebih baik.



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nornor 3 Tahun 2009;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030;
 18. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);



19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di DIY.
2. Mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Lautkan secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang lain, terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2017-2022 ini adalah :

1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.
2. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang



bersifat tahunan.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di DIY;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik karena adanya pengukuran kinerja yang jelas.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, berikut adalah struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 - a. Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap.
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
6. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
 - b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
7. UPT; dan
8. Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi



serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
- h. perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- j. pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
- l. penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kab/Kota dalam DIY;
- m. penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- n. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
- o. perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan;
- s. pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi nya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :



- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- k. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- l. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- m. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat di bagi menjadi 3 Subbagian, yaitu Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, Subbagian Program dan Informasi. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

a. Subbagian Umum;

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Subbagian Umum;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis urusan umum;
- 3) pengelolaan kearsipan;
- 4) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- 5) pengelolaan barang;



- 6) pengelolaan data kepegawaian;
- 7) penyiapan bahan mutasi pegawai;
- 8) penyiapan kesejahteraan pegawai;
- 9) penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- 10) penyelenggaraan kehumasan;
- 11) pengelolaan kepustakaan;
- 12) penyiapan bahan ketatalaksanaan;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis urusan keuangan;
- 3) pengelolaan keuangan Dinas;
- 4) pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- 5) pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
- 6) penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Program dan Informasi

Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas penyusunan program Dinas, pengelolaan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Subbagian Program;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- 3) penyusunan rencana program Dinas;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan;



- 5) pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang kelautan dan perikanan;
- 6) penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang kelautan dan perikanan;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan budidaya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi sertifikasi perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan produksi perikanan budidaya;
- f. pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. pengembangan perbenihan perikanan budidaya;
- h. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya;
- i. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Budidaya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan budidaya dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Teknis Perikanan Budidaya dan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



a. Seksi Teknis Perikanan Budidaya

Seksi Teknis Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis perikanan budidaya. Seksi Teknis Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Seksi Teknis Perikanan Budidaya;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan budidaya ikan;
- 3) pengelolaan data teknis perikanan budidaya;
- 4) pembinaan mutu benih/induk ikan;
- 5) pembinaan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan;
- 6) pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budidaya serta perlindungannya;
- 7) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hama, wabah dan penyakit ikan;
- 8) monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis dan rekomendasi penerbitan sertifikat perikanan budidaya;
- 10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknis Perikanan Budidaya; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan usaha perikanan budidaya. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- 3) pengelolaan data usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
- 4) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan usaha



- perikanan budidaya;
- 5) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan budidaya;
 - 6) pelaksanaan pembinaan fasilitasi usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
 - 7) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya;
 - 8) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - 9) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas di bidang perikanan tangkap. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan tangkap;
- c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi sertifikasi perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan program produksi perikanan tangkap;
- f. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan Tangkap; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan Tangkap dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Teknis Perikanan Tangkap dan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



a. Seksi Teknis Perikanan Tangkap

Seksi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas Seksi Teknis Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis perikanan tangkap;
- 3) pengelolaan data teknis perikanan tangkap;
- 4) pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
- 5) fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
- 6) penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, standarisasi kelaikan kapal perikanan dan pengawakan kapal;
- 7) pembinaan dan pengendalian penerapan tatalaksana perikanan tangkap;
- 8) pengembangan teknologi perikanan tangkap;
- 9) pelaksanaan bimbingan teknis dan rekomendasi penerbitan sertifikasi perikanan tangkap;
- 10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknis Perikanan Tangkap; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap;
- 3) pengelolaan data kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- 4) pembinaan dan fasilitasi usaha perikanan tangkap;
- 5) penyiapan bahan pertimbangan teknis, rekomendasi perijinan dan dokumen usaha perikanan tangkap;
- 6) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;



- 7) pengembangan kelembagaan perikanan tangkap;
- 8) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- 9) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan memberikan rekomendasi izin usaha dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. Pelaksanaan program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Seksi Pemasaran Hasil Perikanan. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :



a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan hasil perikanan. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan hasil perikanan, pengelolaan laboratorium dan pengujian mutu hasil perikanan;
- 3) pengelolaan data usaha pengolahan hasil perikanan;
- 4) pembinaan unit-unit pengolahan;
- 5) pengembangan kelembagaan pengolahan hasil perikanan;
- 6) pelaksanaan pengelolaan laboratorium, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- 7) pembinaan dan fasilitasi usaha pengolahan hasil perikanan;
- 8) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu hasil perikanan;
- 9) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan pengolahan hasil perikanan;
- 10) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pengolahan hasil perikanan;
- 11) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengolahan Hasil Perikanan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan

Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan hasil perikanan. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- 3) pengelolaan data usaha pemasaran hasil perikanan;
- 4) pembinaan unit-unit pemasaran;
- 5) pengembangan kelembagaan pemasaran hasil perikanan;



- 6) fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- 7) penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rekomendasi perijinan pemasaran hasil perikanan;
- 8) fasilitasi kemitraan, investasi dan permodalan usaha pemasaran hasil perikanan;
- 9) penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan usaha pemasaran hasil perikanan;
- 10) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kelautan, pesisir, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kelautan, pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
- g. penerbitan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang laut;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- i. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan program rehabilitasi ekosistem dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;



- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan dibagi menjadi 2 seksi yaitu Seksi Pendayagunaan Laut dan pesisir dengan Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir :

Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir. Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan pendayagunaan laut dan pesisir;
- 3) pengelolaan data pendayagunaan laut dan pesisir;
- 4) pengembangan jasa kelautan;
- 5) penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perairan, pulau-pulau kecil dan laut;
- 6) pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- 7) pelaksanaan mitigasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- 9) pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang laut;
- 10) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
- 11) pembinaan dan pengendalian tata ruang laut;
- 12) pembinaan kebaharian;
- 13) pembinaan pengelolaan sumber daya kelautan;
- 14) pengembangan teknologi kelautan;
- 15) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir; dan
- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 2) penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya Kelautan dan perikanan;
- 3) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
- 4) pembinaan dan fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 5) pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil;
- 6) pemantauan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 7) pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPT;

a. UPT Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya terdiri dari:

- 1) Kepala Balai;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar;
- 4) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan
- 5) Jabatan Fungsional.

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja;



- 2) pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- 3) pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut;
- 4) pelaksanaan pengelolaan induk ikan;
- 5) pelaksanaan diseminasi induk dan benih unggul;
- 6) pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan;
- 7) pelaksanaan ketatausahaan;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng terdiri dari:

- 1) Kepala Pelabuhan;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- 4) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
- 5) Jabatan Fungsional.

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja;
- 2) pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi pelabuhan perikanan;
- 3) pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
- 4) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 5) pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- 6) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 7) fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- 8) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 9) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;



- 10) fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 11) pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- 12) pelaksanaan pengawasan penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik;
- 13) pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- 14) pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan;
- 15) pelaksanaan ketatausahaan;
- 16) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data tahun 2017, Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berjumlah 129 orang, dengan rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 65 orang, pegawai UPTD Balai Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP) sejumlah 45 orang dan pegawai UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sejumlah 19 orang. Rincian jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

INSTANSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Dinas Kelautan dan Perikanan	39	26	65
BPTKP	40	5	45
PPP Sadeng	19	0	19
Jumlah	98	31	129

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 74,10%. Jumlah pegawai pada dinas induk mencapai 52,52% sedangkan jumlah pegawai pada UPTD BPTKP Cangkringan mencapai 32,37% dan PPP Sadeng sebesar 15,12%.

Proporsi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	PROSENTASE (%)
Sekolah Dasar	13	10,07
SLTP	7	5,43
SLTA	43	33,33
D1	-	-
D2	-	-
D3	11	8,53
D4	3	2,32
S1	34	26,36
S2	17	13,18
S3	1	0,77
Jumlah	129	100

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran kualitas SDM yang ada disuatu instansi. Secara normatif tingkat pendidikan formal akan berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan dan kapasitas seseorang. Namun juga perlu didukung pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang baik. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dinas kelautan dan perikanan DIY didominasi oleh lulusan SMA



yaitu sebanyak 43 orang (33,33%) dan Sarjana sebanyak 34 orang (26,36%) Sedangkan tingkat pendidikan paling kecil adalah S3 yaitu 0,77% atau 1 orang saja.

Sedangkan dilihat dari pangkat dan golongan, pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dikelompokkan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat /Golongan	JUMLAH (orang)	PROSENTASE (%)
I/A	-	
I/B	8	6,20
I/C	3	2,32
I/D	1	0,77
II/A	10	7,75
II/B	5	3,87
II/C	17	13,17
II/D	3	2,32
III/A	7	5,42
III/B	20	15,50
III/C	18	13,95
III/D	22	17,05
IV/A	12	9,30
IV/B	3	2,32
IV/C	-	
IV/D	-	
Jumlah	129	100

Sumber: Dislautkan DIY, 2017

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagian besar berpendidikan SLTA/ sederajat dan Sarjana (S1). Jumlah pegawai yang terbanyak berasal dari pangkat dan golongan Penata Muda Tk I atau III d sebanyak 22 orang, disusul dengan pegawai golongan II b atau Pengatur sebanyak 20 orang dan pegawai pada golongan III c atau Penata Tk I sebanyak 18 orang. Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 1 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY No 66 Tahun 2008, Peraturan Gubernur DIY No 2 tahun 2012 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional



Umum (JFU) dan Peraturan Gubernur DIY No 3 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur DIY No 68 tahun 2008 tentang jenis dan kebutuhan JFT DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY formasi 160 orang baru terisi 65 orang atau baru terisi 40,62%.
- 2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) formasi 100 orang terisi 45 orang atau baru terisi 45,00%.
- 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng formasi 58 orang terisi 19 orang atau baru terisi 32,76%.

Sarana dan prasarana aparatur di Dinas kelautan dan Perikanan DIY telah cukup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Namun sarana dan prasarana aparatur ini belum berada pada kondisi ideal. Keadaan sarana dan prasarana ideal berdasarkan pada analisis kebutuhan terhadap jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Telah dilakukan upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kelautan dan perikanan DIY, antara lain melalui kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan dinas, Pengadaan dan pemeliharaan mebeleur sampai pada Rehabilitasi gedung kantor. Selengkapnnya mengenai kondisi riil sarana dan prasarana aparatur dibandingkan dengan kondisi idealnya diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI RILL (BUAH/UNIT)	KONDISI IDEAL (BUAH/UNIT)
1	Kendaraan roda 4	14	25
2	Kendaraan roda 2	14	25
3	Genset	3	3
4	Kursi kerja staf	5	100
5	Meja staf	5	100
6	Meja eselon IV	12	12
7	Meja eselon III	4	4
8	Kursi eselon IV	12	12
9	AC	37	37



11	Komputer	27	27
12	Laptop	36	45
13	Mesin ketik	5	5
14	Kipas angin	12	12
15	Filing kabinet	15	24
16	Lemari arsip	15	30
17	Rak buku	5	20
18	Printer	23	23
19	LCD	6	10

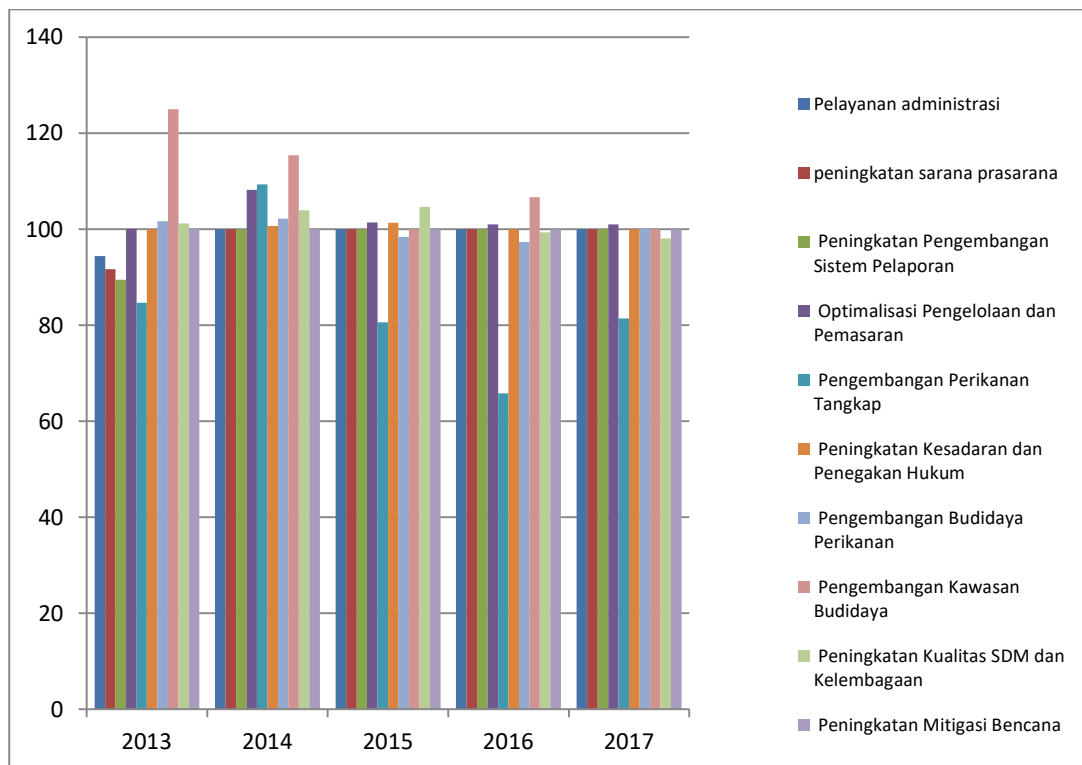
Sumber: Dislautkan DIY, 2016

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melakukan evaluasi hasil pelaksanaan renstra, maka indikator kinerja yang dipakai adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dievaluasi secara tahunan. Indikator Kinerja tahunan yang dievaluasi adalah:

- 1 Pelayanan Administrasi
- 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
- 4 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
- 5 Pengembangan Perikanan Tangkap
- 6 Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
- 7 Pengembangan Budidaya Perikanan
- 8 Pengembangan Kawasan Budidaya
- 9 Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan
- 10 Peningkatan Mitigasi Bencana
- 11 Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA

Secara garis besar, perbandingan antara target dan realisasi yang ada pada IKU dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Target dan Realisasi Renstra 2013-2017

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dari sekian indikator kinerja utama atau program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dari tahun pertama (2013) sampai tahun kelima (2017) renstra DKP, terlihat sebagian besar telah mencapai target. Hanya pada program pelayanan administrasi, peningkatan sarana prasarana aparatur dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan yang tidak tercapai (tidak mencapai 100%) pada tahun 2013 saja, tahun berikutnya semua tercapai kinerjanya. Begitu juga dengan program pengembangan perikanan tangkap yang pada tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017 tidak tercapai kinerjanya, hanya pada tahun 2014 yang realisasinya melebihi target, yaitu diatas 100%.

Ada 11 indikator kinerja yang dievaluasi, dalam gambar baru terlihat 10 indikator capaian. Sedangkan 1 indikator yang tidak tercantum adalah indikator atau program ekosistem dan sumber daya alam, yang kegiatannya dimulai pada tahun kedua (2014), dan pencapaian melebihi target tahunan dan target akhir. Untuk lebih jelasnya pencapaian pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017

No	Program/Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	94,41	100	100	100	100	94,41	100	100	100	100		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100	100	100	100	100	91,68	100	100	100	100	91,68	100	100	100	100		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase terlaksananya pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	89,44	100	100	100	100	89,44	100	100	100	100		
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaan	25,78	27,17	28,55	29,94	31,32	25,8	27,54	28,95	30,24	30,24	100,0776	108,22	101,4	101,02	101,0		
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)	5.900	6.400	6.900	7.600	8.400	4.996,40	6.996,90	5.559,97	5.001,20	6.815	84,68	109,3	80,58	65,80	81,36		
6	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut		Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	300	300	300	300	300	300	302	304	300	300	100	100,67	101,33	100	100		
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	56.200	63.000	70.500	79.000	88.500	57.902,72	64.394,24	69.384	76.875,6	88.550	101,64	102,21	98,42	97,31	100,05		
8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar.		Peningkatan luas kawasan budidaya air laut, air payaudan air tawar (ha)	12	13	14	15	16	15	15	15	16	16	125	115,38	100	106,67	100		
9	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kelautan dan perikanan		NTP sektor perikanan	114,92	115,42	116,89	105	106	116,31	119,92	122,34	104,29	101,78	101,20	103,9	104,66	99,32	98,02		
10	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut		Peningkatan penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut (orang)	1.170	1.350	1.530	1.710	1.890	1.170	1.350	1530	1.710	1.890	100	100	100	100	100		
11	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam		Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total (ha)	0,06	0,08	0,011	0,013	0,016	0	1,42	1,42	1,42	1,42	0	1,750	1290,91	10923,08	10,923,08		
Rata-Rata pencapaian kinerja per tahun														98,82	253,61	217,73	1.081,20	1.082,13		



Berdasarkan Tabel di atas, secara umum pencapaian dari tahun ke tahun berdasarkan program/kegiatan banyak yang tercapai, beberapa bahkan melebihi target. Dilihat pada setiap indikator, maka untuk indikator Pelayanan Administrasi target yang tidak tercapai adalah pada tahun 2013 yaitu 94,4% sedangkan tahun berikutnya tercapai semua. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur pada tahun 2013 tidak tercapai yaitu 91,68% sedangkan tahun berikutnya tercapai semua. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan tidak tercapai pada tahun 2013 yaitu 89,44%, sedangkan tahun berikutnya tercapai semua. Jika dilihat rata-rata per tahun, maka target kinerja hampir semuanya melebihi target dengan angka terbesar ada pada tahun 2017 yaitu 1.081,20 %, yang hal ini dikarenakan realisasi program rehabilitasi ekosistem tercapai lebih dari 1000%, sedangkan pencapaian tahunan terkecil ada pada tahun 2013 yaitu 98,82%.

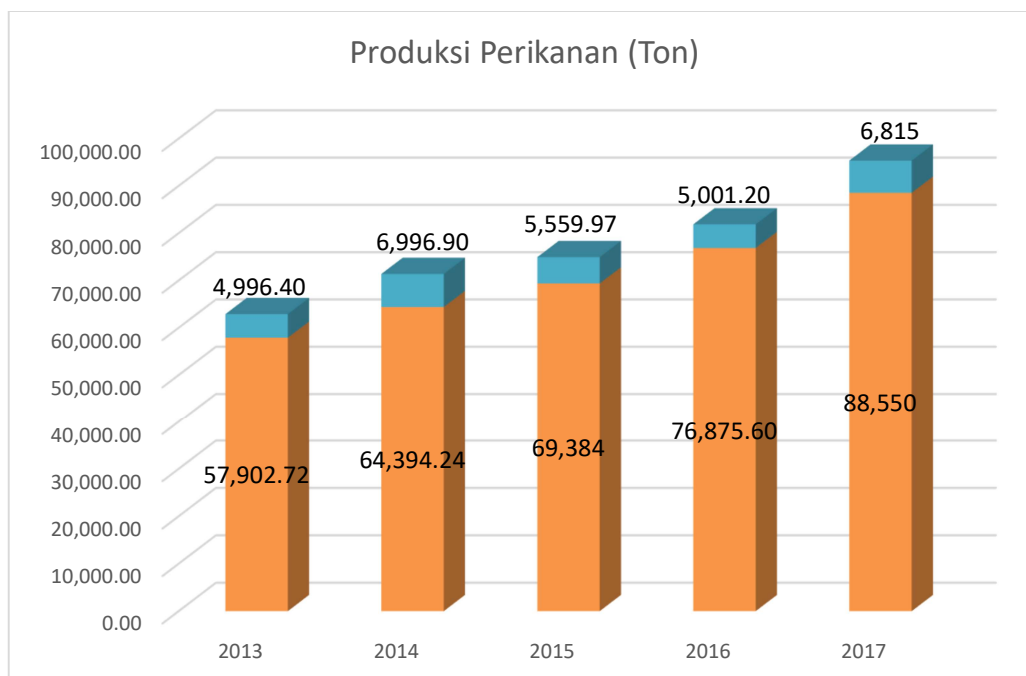
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran pertahunnya tercapai semua dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2016 yaitu angka ketersediaan ikan 30,24 kg/kap/th, sedangkan angka konsumsi ikan 24,00 (meskipun jauh dibawah angka nasional 43,0). Data pendukung dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 6. Realisasi Ketersediaan Ikan dan Angka Konsumsi Ikan

Tahun	Ketersediaan Ikan		Angka Konsumsi Ikan (AKI) (Kg/Kap/Th)		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nasional
2012	20,3	23,73	12,74	14,54	33,89
2013	25,78	25,8	15,54	21,71	35,21
2014	27,17	27,54	14,91	21,74	38,14
2015	28,55	28,95	15,63	23,07	41,11
2016	29,94	30,24	16,35	24,00	43,00
2017	31,65	32,16	23,73	23,75	47,00

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum tercapai semua, dengan capaian tertinggi pada tahun 2015 yaitu tahun 304 dokumen dari target yang ditentukan 300 dokumen. Pengembangan Perikanan Tangkap realisasinya tidak tercapai pada tahun 2013, 2015 dan 2016, sedangkan tahun 2014 capaian

melebihi target yaitu realisasi 6.996,9 ton dari 6.400 ton target yang ditentukan, sehingga rasionya 109,3%. Pengembangan Budidaya Perikanan pada tahun 2015 dan 2016 tidak tercapai targetnya, meskipun realisasinya meningkat terus dari tahun ke tahun.

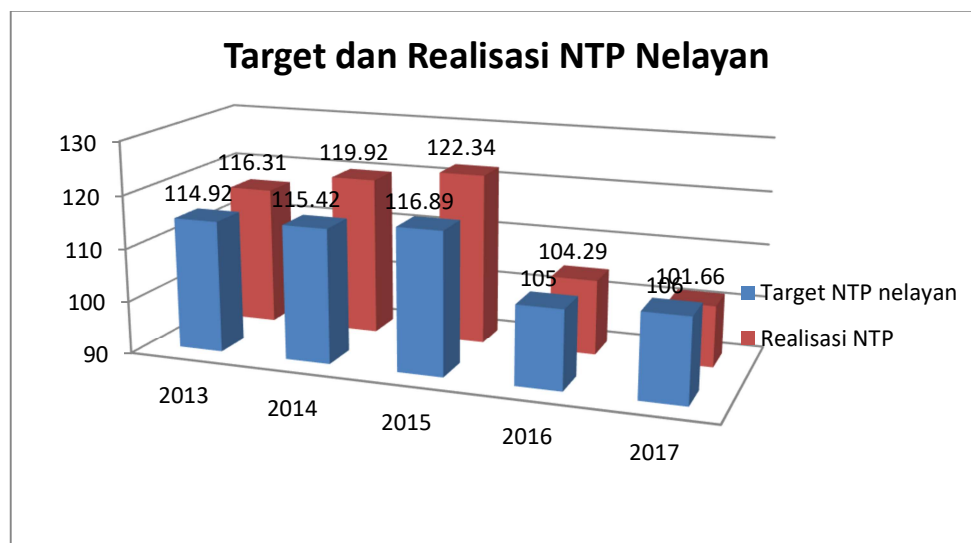


Gambar 2. Realisasi Produksi perikanan tangkap dan Budidaya

Pengembangan Kawasan Budidaya targetnya tercapai semua setiap tahunnya dengan pencapaian ada 16 ha ditahun 2016. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan pada tahun 2016 tidak tercapai realisasinya, sedangkan tahun sebelumnya tercapai semua. Program mitigasi bencana antara target dengan sasaran tercapai semua 100% setiap tahunnya. Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA meskipun baru dimulai tahun 2014 (tahun ke dua), tetapi realisasinya adalah rata-rata 1,4 ha per tahun.

Peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu sasaran yang cukup penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di DIY yang ditunjukkan dengan indikator NTP sektor perikanan

meningkat. Pada tahun 2015 kinerja sasaran ini telah mencapai 104,66%, meskipun ada penurunan pada tahun 2016 dan 2017, hal tersebut disebabkan metode perhitungan yang berbeda. Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perikanan yang meningkat dapat diartikan bahwa ada peningkatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan dibanding tingkat pemanfaatan rumah tangga sehingga masih ada surplus pendapatan.



Gambar 3. Target dan Realisasi NTP Nelayan

Kinerja tidak hanya dilihat dari pencapaian kinerja pelaksanaan saja, namun juga juga kinerja anggarannya. Logikanya penyerapan anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan program. Semakin besar serapan anggaran, maka semakin bagus kinerjanya, meskipun dalam beberapa kasus terjadi pencapaian tinggi dengan anggaran yang kecil. Hal tersebut dapat terjadi karena efisiensi atau ada dukungan kebijakan dari instansi lain. Untuk melihat kinerja anggaran, dapat dilihat pada rasio kinerja dan anggaran berikut ini:



Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2012-2017

No	Program/ Kegiatan	Target					Realisasi					Rasio				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.313.365.340	1.875.411.652	3.592.548.600	3.116.827.756	3.750.644.798	610.629.383	636.207.804	2.592.548.600	2.714.528.177	3.447.881.161	46,49	33,92	72	87,09	91,93
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.368.520.683	3.355.515.820	4.689.880.998	9.389.118.036	7.270.980.400	959.824.692	1.040.567.100	4.632.157.679	8.154.697.234	7.011.383.029	28,49	31,01	99	86,85	96,43
3	Program Peningkatan Pengembangan an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	374.741,950	274.265,600	303.000,000	580.499,850	531.365,700	329.336,450	249.188.800	296.136.636	546.794.404	527.917.925	88	90,85	98	94,19	99,35
4	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	889.409,150	1.484.752.300	1.339.636.950	2.675.443.800	4.652.659.875	839.866,650	1.412.773,675	1.287.815,200	2.139.195,550	4.336,072.908	94,43	95,15	96	79,96	93,20
5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	20.198,650.390	14.261,401.603	32.018,155.200	7.642,522.800	7.230,868.350	994.554,000	2.395.970,600	28.815.349,930	3.661.914,004	6.254,193.800	4,92	16,80	90	47,91	86,49



6	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	124.993.000	274.060.000	439.248.900	1.355.046.000	265.137.150	107.143.000	272.530.000	429.702.850	1.159.068.450	248.704.650	85,72	99,44	93,80	85,54	93,80
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	8.961.877.694	6.266.795.440	8.970.520.400	7.577.635.052	8481.591.000	4.038.334.240	2.981.138.350	8.035.303.790	7.107.928.935	7.592.453.600	45,06	47,57	90	93,80	89,52
8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau, dan Air Tawar.	795.009.830	876.717.000	374.000.000	939.802.250	289.9983.300	758.683.570	876.717.000	369.561.700	925.276.150	2793633300	95,43	100,00	99	98,45	96,33
9	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan	135.420.500	525.797.450	343.620.400	827.420.400	102.8170.000	130.333.500	520.322.725	334.971.000	564.379.900	938.855.096	96,24	98,96		68,21	91,31



10	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	74.958.000	100.000.000	50.000.000	415.000.000	315.420.000	74.278.000	97.998.000	48.749.850	281.371.000	309.901.000	99,09	98,00	97	67,80	98,25
11	Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam	121.896.450	220.461.530	130.335.775	1.264.280.900	1.375.887.000	120.029.950	218.710.525	130.243.500	1.125.635.525	998.059.500	98,47	99,20	100	89,03	72,54
Rata-rata Pencapaian anggaran per tahun																
												71,11	73,72	76,42	81,71	91,15



Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan rata-rata pencapaian anggaran berada pada level tinggi (antara 71 % ≤ 91%). Namun dengan anggaran yang kecil dengan pencapaian kinerja yang optimal, maka diindikasikan telah terjadi efisiensi anggaran atau ada kebijakan dari SKPD lain atau instansi lain dengan sasaran yang sama. Pada tahun 2013 pencapaian penyerapan anggaran 71,11%, pada tahun 2014 penyerapan anggaran 73,72%, pada tahun 2015 dengan penyerapan anggaran 76,42%, pada tahun 2016 penyerapan anggaran 81,71%, dan pada tahun 2017 penyerapan anggaran 91,15%. Jika pencapaian kinerja anggaran digambarkan, maka akan terlihat trend kenaikan dari tahun ke tahun.



Gambar 4. Grafik pencapaian kinerja Anggaran.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui trend pencapaian realisasi anggaran adalah naik. Terendah berada di tahun pertama 2013 sebesar 71,11% dan terbesar berada pada tahun 2017 yaitu 91,15%. Kenaikan secara bertahap pada penyerapan anggaran dikarenakan semua program sudah mulai berjalan sesuai perencanaan. Disamping itu secara administrasi sudah semakin tertata dan semakin baik sehingga penganggaran dapat berjalan lancar dan kesalahan teknis dapat diminimalisir.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan DIY sejauh ini berdasarkan data di atas secara umum telah mengalami peningkatan di beberapa bagian dari tahun ke tahun. Namun dinamika di lapangan dan masyarakat terus berkembang sehingga menciptakan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tantangan yang muncul diantaranya adalah:

1. Wilayah pantai dan pesisir sebagai pintu depan wilayah DIY, sehingga memunculkan mindset among tani dagang layar.
2. Melakukan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Peningkatan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat DIY yang sehat dan aman
4. Pelaku usaha sektor perikanan tangkap dan budidaya lebih tertarik pada sektor lain, terutama sektor wisata.
5. Terjadi alih fungsi lahan tambak di pesisir Kulon Progo karena pembangunan NYIA.
6. Perubahan iklim dan cuaca menyebabkan produksi perikanan tidak pasti
7. Meningkatkan kualitas produk perikanan yang berdaya saing tinggi.
8. Menyediakan pelayanan kelautan dan perikanan lebih profesional.

Selain tantangan, peluang juga dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pelayanan SKPD, yaitu:

1. Peluang Visi Gubernur DIY yang berbunyi "Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Peluang yang dimaksud adalah dukungan politik dan kewenangan untuk melakukan pembangunan seluas-luasnya di laut dan pesisirnya.
2. Peluang dalam aspek hukum memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, diantaranya: UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UU No 45 Tahun



2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; Perda DIY No 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011-2030; Pergub DIY No 38 Tahun 2011 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY.

3. DIY mempunyai garis pantai yang luas dan memungkinkan atau berpeluang untuk memproduksi garam. Peluang ini untukantisipasi kekurangan garam seperti tahun 2017 yang kemudian direspon oleh presiden, kementerian Kelautan dan sampai pada Gubernur DIY.
4. Perikanan darat masih sangat mungkin dikembangkan dengan optimal. Karena potensi didaerah-daerah tertentu masih sangat banyak dan belum di garap.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan sehingga pola konsumsi ikan meningkat, sehingga pangsa pasar ikan semakin meningkat.
6. Perubahan minsed baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa pembangunan kelautan lebih diutamakan dari pada di darat, karena potensi dilaut belum banyak termanfaatkan.
7. Pertumbuhan sektor pariwisata membutuhkan input dari sektor perikanan dalam mendukung penyediaan makan minum
8. Pengintegrasian dengan pertanian melalui sistem mina padi maupun integrasi dengan sektor kehutanan melalui budidaya ikan di kawasan hutan dapat meningkatkan produksi perikanan
9. Permintaan dari industri pengolahan ikan non makanan (kosmetik, medis, kerajinan)



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kuantitas dan kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
2. Belum beroperasinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, yang diperkirakan akan mampu menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY.
3. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir.
4. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.
5. Penanaman mindset among tani dagang layar, menuju abad samudra hindia tidak bisa instan, hal ini perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan strategis berkelanjutan yang terintegrasi antar bidang dan antar sektor.
6. Tumpang tindih kewenangan terkait pengelolaan mangrove antara kehutanan, BLH, kelautan.
7. Belum terkelolanya secara optimal pesisir dan laut 0-12 mil DIY.
8. Kemiskinan nelayan masih tinggi dan ketimpangan ekonomi juga masih tinggi antara wilayah nelayan dengan wilayah daratan.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah *"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"*. Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia". Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek : Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;

Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson); Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan :

a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan



sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun



internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi

Adanya potensi yang besar tersebut menjadikan tantangan dan sekaligus peluang yang harus dicermati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Peran dinas kelautan dan perikanan dapat menjadi punggawa karena kelautan merupakan wilayah kerjanya sesuai kewenangan bidangnya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional". Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan



kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk dapat memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam Renstra DKP 2017-2022 maka perlu menyandingkan dengan Renstra Dinas Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Visi dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Kedaulatan Pangan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Pertanian dan Perikanan. Hal ini sudah sesuai dengan Visi pemda DIY sehingga sudah ada benang merah yang menghubungkan target kinerjanya. Hal ini juga sudah sesuai dengan misi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang pertama dan kedua yaitu Meningkatkan Ketersediaan, Keragaman, dan Keterjangkauan Pangan Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Usaha Pertanian dan Perikanan. Indikator sasaran yang sama dengan Pemda DIY meliputi Peningkatan produksi pangan yang berkualitas, Peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian dan perikanan, Peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian dan perikanan yang professional.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021

Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yaitu Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang ditandai dengan : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap, Meningkatnya Kualitas Kelompok Masyarakat Pesisir, Meningkatnya Kawasan Budidaya



Laut, Air Payau Dan Tawar, Kelompok Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Mandiri Dan Sejahtera

Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan dengan cara Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang ditandai dengan : Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat, Kelompok masyarakat pengawas perikanan meningkat, Berkurangnya tingkat pelanggaran.

Sasaran Utama dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah : Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat (Nilai Pendapatan Perikanan Budidaya dan Nilai Pendapatan Nelayan), Produksi Perikanan Budidaya Meningkat, Produksi Perikanan Tangkap Meningkat. Sedangkan Sasaran Pendukung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah : Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkat, Kesesuaian Program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2021
Tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo ialah Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya dengan Sasaran meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2016-2021
Tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah “ Meningkatkan Ketersediaan dan Mutu Pangan”. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan sama dengan Tujuan yang hendak dicapai yaitu “ Ketersediaan dan Mutu Pangan Meningkat ”.
5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021



Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah: Memperkuat tata kelola Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh SKPD), Meningkatnya daya saing sektor pertanian (Meningkatnya kesejahteraan petani), dan Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam (Perlindungan dan konservasi sumber daya alam).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan melalui Perda no 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029. Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan strategis jawa-bali maupun kawasan strategis provinsi.

Terkait kelautan dan perikanan maka DIY juga sudah mempunyai Perda DIY no 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030, Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumberdaya sangat potensial. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi



manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor Kelautan dan Perikanan. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di DIY selama rentang waktu 2017-2022 hingga di tingkat kabupaten/kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi misi dan renstra serta dokumen pendukung yang ada maka ditentukan isu strategis kelautan perikanan yang meliputi :

1. Pembangunan dan rencana operasional NYIA harus disikapi dengan bijaksana dan tepat, terutama tentang pengelolaan wilayah sekitar Bandara.
2. Kebutuhan yang mendesak untuk beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarta sebagai wilayah dukung pertumbuhan ekonomi berbasis nelayan.
3. Peningkatan standarisasi, sertifikasi mutu dan keamanan produk perikanan agar mempunyai daya saing yang tinggi
4. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat karena ketidakpastian penghasilan, sehingga profesi nelayan dilakukan hanya sambilan dan pilihan pekerjaan terakhir. Maka perlu upaya untuk membangun generasi nelayan yang baru, yang lebih baik kualitasnya dan semangatnya.
5. Koordinasi masih kurang optimal, baik antar bagian maupun antar seksi,



baik dalam pelaksanaan program di lapangan maupun dalam perencanaan.

6. Produksi perikanan tangkap terkendala oleh kualitas SDM, kualitas-kuantitas dan kapasitas alat tangkap, serta terkendala cuaca dan perubahan iklim sehingga hasil belum optimal.
7. Terjadinya trend laju percepatan alih fungsi lahan pertanian (termasuk lahan usaha perikanan) menjadi lahan perumahan, pemukiman, dan industri serta peruntukan lainnya pada beberapa tahun terakhir, akan berpotensi pada penurunan ketersediaan produk perikanan bagi masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 8. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (Sumber BPS)
				Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi

Tabel 9 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Strategi dan Kebijakan Tujuan Pertama (Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan)

a. Strategi

- 1) Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan
- 2) Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan

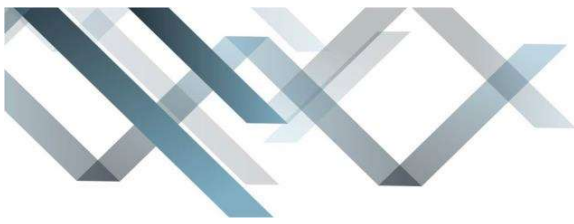
b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK
- 2) Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.
- 4) mengembangkan sistem pemasaran yang modern
- 5) Pendampingan dan pengawalan kelompok

2. Strategi dan Kebijakan Tujuan Kedua (Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan)

a. Strategi

- 1) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan



yang berkelanjutan

- 2) Pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi

b. Kebijakan

- 1) Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan lingkungan
- 2) Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan
- 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.



Tabel 10. Analisis SWOT

IFAS (Internal) EFAS (Eksternal)	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>) • Dukungan kebijakan nasional • Dukungan kebijakan kepala daerah yang besar • Pengembangan produksi garam di pesisir DIY • Beroperasinya NYIA membutuhkan dukungan • Kerjasama dengan investor terbuka lebar • Kerjasama dengan akademisi terbuka lebar	STRATEGI S-O • Mengoptimalkan SDM dan sumberdaya kelembagaan untuk mengembangkan sarana dan prasarana perekonomian berbasis kelautan dan perikanan. • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga untuk pengembangan potensi pesisir	STRATEGI W-O • Mendorong implementasi inovasi di bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produk. • Mendorong kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan iptek dibidang kelautan dan perikanan. • Kerjasama dengan swasta untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan • Koordinasi dengan instansi terkait



• Pasar perikanan terbuka lebar • Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan konsumsi ikan meningkat • Kebutuhan masyarakat terhadap produk perikanan non-konsumsi semakin meningkat		
Ancaman (<i>Threats</i>) • Faktor cuaca dan bencana alam • Rendahnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan • Persaingan produk perikanan dari tempat lain • Alih fungsi lahan perikanan menjadi peruntukan lain • Meningkatnya pencemaran lingkungan • Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan • Stock sumber daya ikan yang semakin menurun	STRATEGI S-T • Mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana sektor Kelautan dan Perikanan • Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan sektor	STRATEGI W-T • Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk mengantisipasi dan meminimalisasi dampak bencana dan kerusakan lingkungan dan antisipasi persaingan usaha • Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas SDM bidang pengawasan untuk mengantisipasi tindakan perusahaan lingkungan dan potensi sumberdaya perikanan kelautan.



Tabel 11. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatnya nilai produksi perikanan	1. Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan 2. Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK 2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk. 4. mengembangkan sistem pemasaran yang modern 5. Pendampingan dan pengawalan kelompok
	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	1. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 2. Pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara terintegrasi	1. Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berawasan lingkungan 2. Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan 3. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya alih fungsi lahan pertanian, kurang optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya serta kurangnya SDM perikanan dan kurang optimalnya kelembagaan pembudidaya ikan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Disamping itu juga harus menyiapkan produk perikanan yang dijual keluar daerah.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pelatihan budidaya perikanan
- 2) pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya
- 3) pendampingan kelembagaan perikanan budidaya
- 4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya

2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Potensi Perikanan tangkap, terutama perikanan tangkap laut di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun, namun tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap laut oleh nelayan DIY baru sekitar 2%. Di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap (kapal dan alat penangkapan ikan) serta kurangnya kuantitas dan



kualitas SDM nelayan dan kurang optimalnya kelembagaan nelayan. Selain itu, ketersediaan ikan DIY masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pelatihan perikanan tangkap bagi nelayan
- 2) pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap
- 3) pendampingan kelembagaan nelayan
- 4) pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan tangkap

3. Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Keberadaan DIY sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan meningkatkan kebutuhan terhadap produk perikanan. Sementara di sisi lain, tingkat konsumsi ikan DIY masih tergolong rendah walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, ketersediaan produk perikanan masih banyak dipasok dari luar DIY. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk olahan ikan dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan
- 2) kampanye/sosialisasi memasyarakatkan makan ikan
- 3) pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- 4) pendampingan kelembagaan pengolah dan pemasar
- 5) pengujian mutu hasil perikanan
- 6) pendampingan standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

4. Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY dengan kontribusi melebihi 90%. Oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan benih unggul perikanan budidaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas benih perikanan budidaya dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

- 1) pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan budidaya



2) pengendalian penyakit ikan

3) standarisasi dan sertifikasi perbenihan perikanan budidaya

5. Pengelolaan Pelabuhan

Kegiatan perikanan tangkap di laut selatan DIY saat ini masih memiliki potensi yang besar diikuti dengan permintaan konsumen akan ikan di DIY dan luar DIY semakin tinggi, namun sampai saat ini dalam pemanfaatan SDI belum dapat optimal. Salah satu penyebabnya yaitu belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan kualitas pelayanan pelabuhan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

1) pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan (pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pokok, fungsional dan pendukung pelabuhan)

2) pembinaan pengelolaan pelabuhan (sosialisasi; pelatihan; bimtek; fasilitasi: jasa kepelabuhan, pemanfaatan lahan dan usaha, pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran, distribusi hasil tangkapan, dan perkarantinaan).

3) pelayanan pelabuhan (penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, SKA, fasilitasi perijinan kapal, tambat labuh, inspeksi pembongkaran ikan, perbekalan, navigasi, pemanfaatan lahan dan usaha, pelayanan jasa kepelabuhan)

6. Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

DIY mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, namun pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan dengan adanya penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, wilayah pesisir DIY mengalami tantangan abrasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan terutama di pesisir sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup:

1) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan

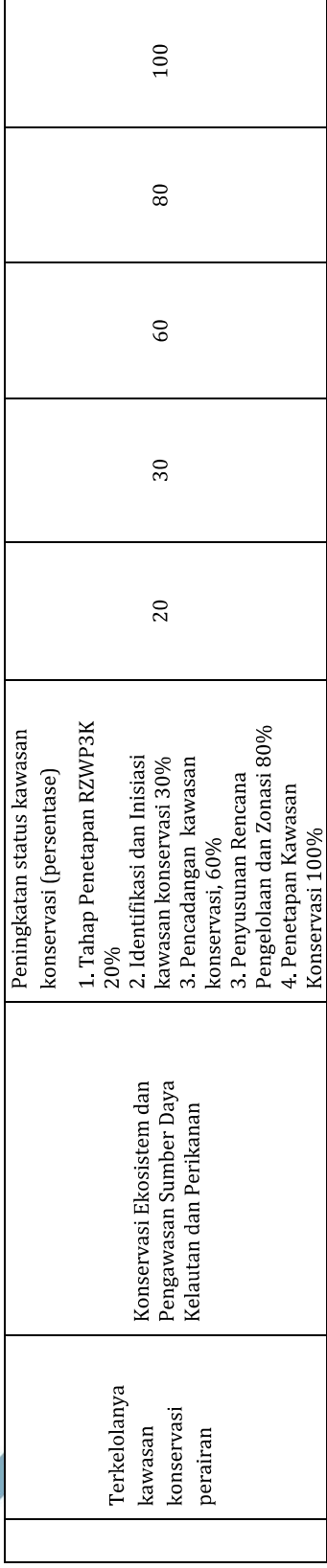
2) pembinaan pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir

3) pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di darat maupun laut



Tabel 12. Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	89.336	89.400	89.500	89.600	89.700
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.817	6.199	6.481	6.863	7.063
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/thn)	N/A	24,55	25,21	25,48	26,05
		Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi produk perikanan olahan (ton)	8.201	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	84	86	88	90
		Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Produksi benih ikan yang bersertifikat (juta ekor)	31,3	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Pelabuhan	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar rupiah)	32,84	33,31	34,78	35,25	36,73



Tabel 13 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan	Meningkatnya nilai produksi perikanan		Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi (%)	100%		100%	3.414.847	100%	4.500.000		4.600.000	100%	4.650.000	100%	4.700.000	100%	21.864.847	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Martabat Manusia logia			A. Penyediaan Jasa, Peralatan, Perlengkapan dan Perkantoran	a. Alat Tulis Kantor b. Alat Listrik dan Elektronik c. Perangkat, Material dan Benda Pos d. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih e. Pembayaran Tagihan Telepon f. Pembayaran Tagihan Listrik g. Surat Kabar dan Majalah h. Pengiriman Dokumen i. Pembayaran Retribusi Sampah j. Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor k. Perawatan Kendaraan Bermotor (KIR dan STNK) kendaraan dinas/operasional roda 2, Roda 3 dan Roda 4 l. Barang cetakan m. Belanja Penggandaan dan Penjilidan n. Surat Keluar o. Surat Masuk	100%	100%	1.604.978	100%	2.115.000	100%	2.162.000	100%	2.185.500	100%	2.209.000	100%	10.276.478	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	-19	-20
			B. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	a. Bukti Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Kepegawaian b. Bukti Pembayaran honorarium PTT c. Bukti Pembayaran honorarium Non PNS d. Belanja luran BPJS PTT (org x bulan) dan Belanja luran BPJS Non PNS e. Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor f. Bukti pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	100%	100%	1.536.681	100%	2.025.000	100%	2.070.000	100%	2.092.500	100%	2.115.000	100%	9.839.181	DKP	DIY
			C. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat b. Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah c. Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	100%	100%	273.188	100%	360.000	100%	368.000	100%	372.000	100%	376.000	100%	1.749.188	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi	100%	100%	790.000	100%	4.500.000	100%	5.463.000	100%	5.900.000	100%	6.330.000	100%	22.983.000	DKP	DIY		
			A.Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	a. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	100%	100%	n/a	100%	2.250.000	100%	2.731.500	100%	2.950.000	100%	3.165.000	100%	11.096.500	DKP	DIY		
			B. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	a. Perlengkapan Kantor b. Peralatan Kantor c. Mebelur	100%	100%	n/a	100%	990.000	100%	1.201.860	100%	1.298.000	100%	1.392.600	100%	4.882.460	DKP	DIY		
			C. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	a. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100%	100%	63.200	100%	360.000	100%	437.040	100%	472.000	100%	506.400	100%	1.838.640	DKP	DIY		
			D. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	a. Kendaraan Roda 2 Terpelihara b. Kendaraan Roda 3 Terpelihara c. Kendaraan Roda 4 Terpelihara	100%	100%	118.500	100%	675.000	100%	819.450	100%	885.000	100%	949.500	100%	3.447.450	DKP	DIY		
			E. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	a. Perlengkapan Kantor b. Peralatan Kantor c. Terpelihara	100%	100%	39.500	100%	225.000	100%	273.150	100%	295.000	100%	316.500	100%	1.149.150	DKP	DIY		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
				c. Mebeleur Terpelihara																	
			F. Pembangunan/Rehabilitasi serta Penyediaan Sarana Pendukung UPTD PPP Sadeng (DAK)	a. Sarana IPAL	100%	100%	568.800	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	568.800	DKP	DIY		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi	100%	100%	330.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	550.000	100%	600.000	100%	2.480.000	DKP	DIY		
			A. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2019	100%	100%	6.600	100%	10.000	100%	10.000	100%	11.000	100%	12.000	100%	49.600	DKP	DIY		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			B. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	a. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program dan 25 kegiatan	100%	100%	33.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	55.000	100%	60.000	100%	248.000	DKP	DIY
			C. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	a. Data Produksi Perikanan dan Kelautan 1 Tahun b. ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	247.500	100%	375.000	100%	375.000	100%	412.500	100%	450.000	100%	1.860.000	DKP	DIY
			D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	a. Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada 9 program 25 kegiatan	100%	100%	42.900	100%	65.000	100%	65.000	100%	71.500	100%	78.000	100%	322.400	DKP	DIY
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	76.875	89.336	1.250.000	89.400	3.000.000	89.500	3.100.000	89.600	3.200.000	89.700	3.300.000	89.700	13.850.000	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		-20	
			A. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	a. Pengembangan Perikanan Budidaya Lela b. Pengembangan Perikanan Budidaya Gurami c. Pengembangan Perikanan Budidaya Nila d. Pengembangan Perikanan Budidaya Ugadi e. Pengembangan Perikanan Budidaya Minapadi f. Pengembangan Budidaya Ikan Hias g. Pengembangan Budidaya Perikanan di bantaran Sungai	n/a	a. 43 kelom pok b. 24 kelom pok c. 29 kelom pok d. 2 kelom pok e. 3 kelom pok f. 2 kelom pok g. 2 kelom pok	1.250.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 43 kelom pok b. 24 kelom pok c. 29 kelom pok d. 2 kelom pok e. 3 kelom pok f. 2 kelom pok g. 2 kelom pok	1.250.000	DKP	DIY
			B. Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	a. Produksi perikanan budidaya, dari kelompok pemula b. Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB dan CBIB	n/a	n/a	n/a	a. 24 ton b. 22 Unit Pembudidayaan /kelom pok	1.200.000	a. 40 ton b. 25 Unit Pembudidayaan /kelom pok	1.240.000	a. 40 ton b. 28 Unit Pembudidayaan /kelom pok	1.280.000	a. 40 ton b. 30 Unit Pembudidayaan /kelom pok	1.320.000	a. 144 ton b. 105 Unit Pembudidayaan /kelom pok	5.040.000	DKP	DIY	



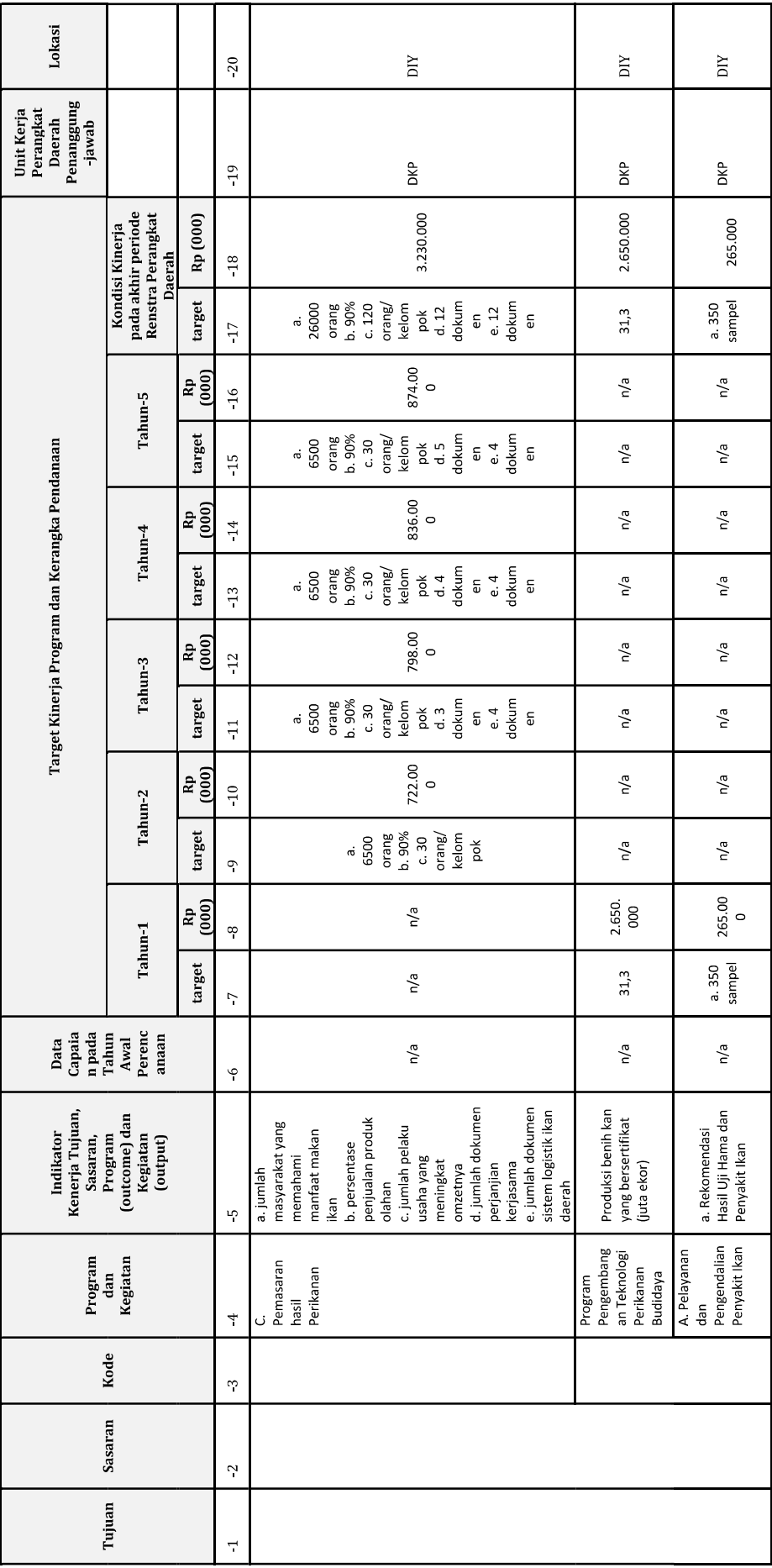
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			C. Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	a. produksi perikanan budidaya, dari kelompok madya b. Jumlah Perijinan Kerjasama Pelaku Usaha perikanan Budidaya (antar UPR dengan Pembudidaya	n/a	n/a	n/a	a. 40 ton b. 2 Dokumen	1.800.000	a. 60 ton b. 2 Dokumen	1.860.000	a. 60 ton b. 2 Dokumen	1.920.000	a. 60 ton b. 2 Dokumen	1.980.000	a. 220 ton b. 8 Dokumen	7.560.000	DKP	DIY
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	5.001	5.817	360.700	6.199	2.500.000	6.481	2.750.000	6.863	4.750.000	7.063	2.900.000	7.063	13.260.700	DKP	DIY
			A. Pengembangan Perikanan Tangkap	a. Pelatihan dan fasilitasi alat tangkap	n/a	a. 12 kelompok	360.700	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 12 kelompok	360.700	DKP	DIY
			B. Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	a. Jumlah nelayan baru b. Jumlah nelayan memiliki sertifikat BST, Simulasi Radar, Perbaikan dan Perawatan Mesin PMT c. Produksi kelompok nelayan	n/a	n/a	n/a	a. 15 orang b. 30 orang c. 48 ton	1.500.000	a. 15 orang b. 30 orang c. 48 ton	1.650.000	a. 15 orang b. 30 orang c. 48 ton	2.850.000	a. 15 orang b. 30 orang c. 48 ton	1.740.000	a. 60 orang b. 120 orang c. 192 ton	7.740.000	DKP	DIY



Tujuan		Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		-19	-20	DKP	DIY		
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					target	Rp (000)
							-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18							
						</																		

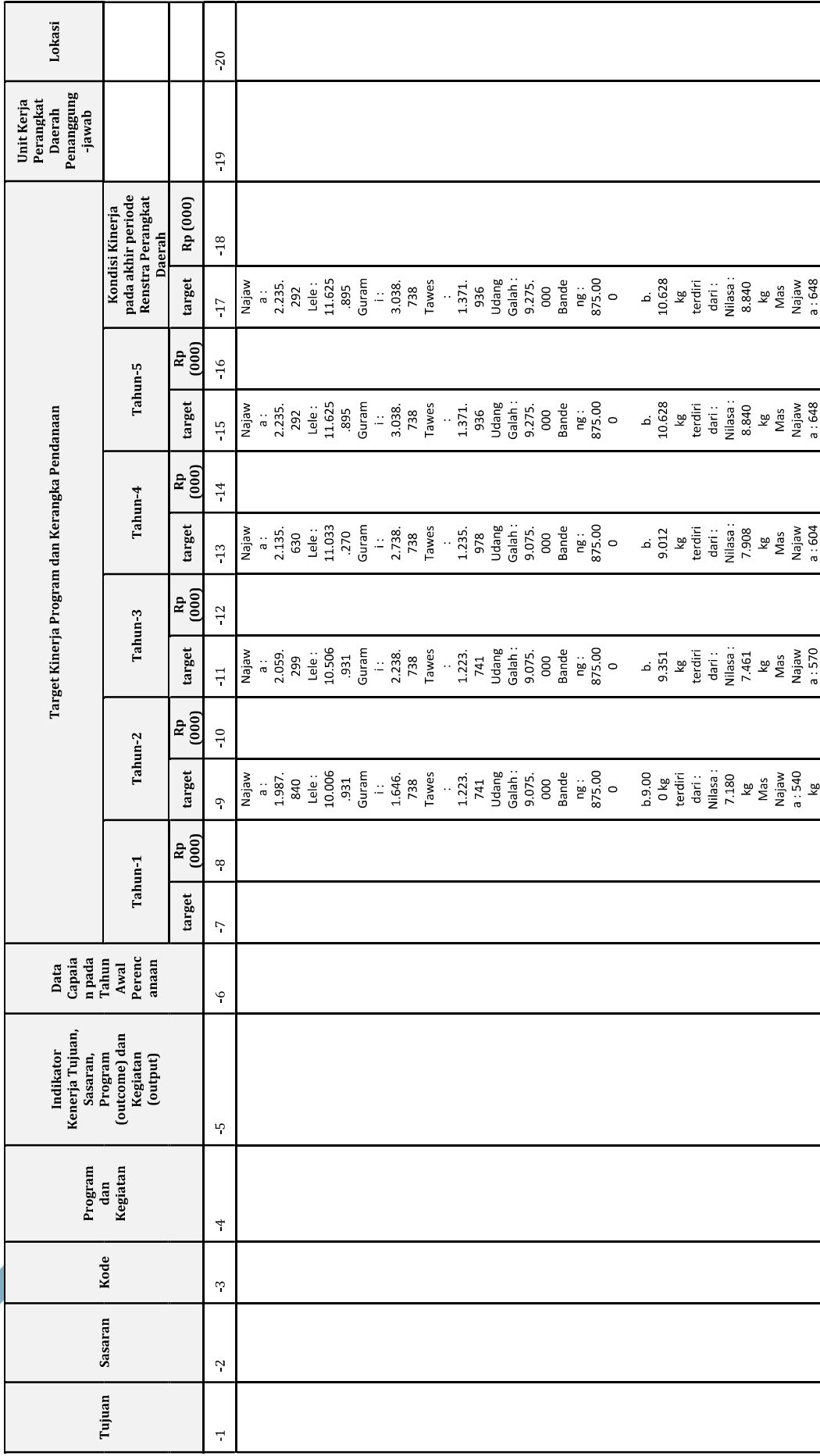


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			B. Pengolahan hasil Perikanan	a. produksi perikanan olahan dari kelompok pemula b. jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas c. produksi perikanan olahan dari kelompok madya d. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diberikan pada Unit Pengolahan Ikan e. Jumlah produk olahan hasil perikanan yang direkomendasikan layak untuk mendaftar SPPT SNI f. Jumlah rekomendasi perijinan usaha g. persentase hasil perikanan yang memenuhi standar mutu	n/a	n/a	a. 0,5 ton b. 3000 orang c. 4,32 ton d. 10 sertifikat e. 2 produk f. 3 rekom endasi usaha g. 70%	1.178.000	a. 0,5 ton b. 3300 orang c. 5,76 ton d. 12 sertifikat e. 2 produk f. 4 rekom endasi usaha g. 75%	1.302.000	a. 0,5 ton b. 3600 orang c. 7,2 ton d. 14 sertifikat e. 2 produk f. 5 rekom endasi usaha g. 78%	1.364.000	a. 0,5 ton b. 3900 orang c. 8,64 ton d. 16 sertifikat e. 2 produk f. 6 rekom endasi usaha g. 80%	1.426.000	a. 2 ton b. 13800 orang c. 25,92 ton d. 52 sertifikat e. 8 produk f. 18 rekom endasi ijin usaha g. 80%	5.270.000	DKP	DIY			





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			B. Perbanyakan Benih Induk, Benih Unggul, dan Teknologi Perikanan Budidaya	a. Benih Ikan dan Udang b. Calon Induk Ikan c. Udang dan Ikan Konsumsi	n/a	a. 30.000.000 ekor b. 9000 kg c. 10.000 kg	2.385.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 30.000.000 ekor b. 9000 kg c. 10.000 kg	2.385.000	DKP	DIY		
			Program Pengembangan perbenihan perikanan budidaya	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	78	n/a	n/a	84	3.500.000	86	3.500.000	88	3.600.000	90	3.700.000	90	14.300.000	DKP	DIY		
			A. Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	a. Rekomendasi Hasil Uji Hama dan Penyakit Ikan	78	n/a	n/a	a. 350 sampel	350.000	a. 350 sampel	350.000	a. 350 sampel	360.000	a. 350 sampel	370.000	a. 1400 sampel	1.430.000	DKP	DIY		
			B. Perbanyakan Benih Induk, Benih Unggul, dan Teknologi Perikanan Budidaya	a. Benih Ikan dan Udang b. Calon Induk Ikan	78	n/a	n/a	a. 32.845.000 ekor terdiri dari : nilasa: 8.029,750 Mas	3.150.000	a. 34.329.649 ekor terdiri dari : Nilasa : 8.350.940 Mas	3.150.000	a. 35.778.594 ekor terdiri dari : Nilasa : 8.684,978 Mas	3.240.000	a. 37.454.238 ekor terdiri dari : Nilasa : 9.032,377 Mas	3.330.000	a. 37.454.238 ekor terdiri dari : Nilasa : 9.032,377 Mas	12.870.000	DKP	DIY		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
								Guram i : 250 kg Lele : 1.030 kg			Guram i : 264 kg Lele : 1.056 kg	Guram i : 280 kg Lele : 1.119 kg		Guram i : 300 kg Lele : 1.200 kg		Guram i : 300 kg Lele : 1.200 kg					
			Program Pengelolaan Pelabuhan	nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan / tempat pelelangan ikan (milyar)	n/a	32.84	150.000	33,31	500.000	34,78	600.000	35,25	700.000	36,73	1.000.000	36,73	2.950.000	DKP	DIY		
			A. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	a. Magang Calon Operator Docking Kapal Perikanan b. Pembinaan Pelayanan Pelabuhan	n/a	a. 2 orang b. 200 orang	150.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 2 orang b. 200 orang	150.000	DKP	DIY		
			B. Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	a. Jumlah nelayan yang beroperasi sesuai rekomendasi pada SOP perizinan dan keselamatan pelayaran b. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP pengelolaan pelabuhan	n/a	n/a	n/a	a. 45 orang b. 55 orang	275.000	a. 50 orang b. 60 orang	330.000	a. 55 orang b. 65 orang	385.000	a. 60 orang b. 70 orang	550.000	a. 210 orang b. 250orang	1.540.000	DKP	DIY		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			C. Pelayanan Pelabuhan Perikanan	a. Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan	n/a	n/a	n/a	a. 50 orang	225.000	a. 60 orang	270.000	a. 70 orang	315.000	a. 80 orang	450.000	a. 260 orang	1.260.000	DKP	DIY
	Terkelolanya kawasan konservasi perairan		Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	n/a	14	350.000	14	800.000	14	1.700.000	14	1.800.000	14	1.900.000	70	6.550.000	DKP	DIY
				Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	n/a	10		10		10		10		10		50		DKP	DIY
			A. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	a. Pendampingan konservasi ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan b. Penebaran Benih Ikan (kepiting, bandeng, nila, dan tawar)	n/a	a. 440 orang b. 2.912.000 ekor	227.500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 440 orang b. 2.912.000 ekor	227.500	DKP	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
			B. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Laut dan Laut	a. Perairan darat dan laut aman	n/a	a. 1 tahun	122.500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a. 1 tahun	122.500	DKP	DIY		
			C. Gerakan Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	a. Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	n/a	n/a	n/a	a. 100 orang	112.000	a. 100 orang	238.000	a. 100 orang	450.000	a. 100 orang	475.000	a. 400 orang	1.275.000	DKP	DIY		
			D. Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Populasi Sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah	n/a	n/a	n/a	a. 940.000 ekor	216.000	a. 1.000.000 ekor	459.000	a. 1.000.000 ekor	396.000	a. 1.000.000 ekor	418.000	a. 4.000.000 ekor	1.489.000	DKP	DIY		
			E. Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	a. jumlah dokumen yang dibuat dalam rangka bukti peningkatan status kawasan konservasi	n/a	n/a	n/a	a. 1 Dokumen Rekomendasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan	192.000	a. 1 SK Gubernur Pencadangan kawasan an	408.000	a. 1 Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konser vasi	324.000	a. 1 Dokumen pengajuan peneta pan kawas an konser vasi di wilayah	342.000	a. 1 Dokumen pengajuan peneta pan kawas an konser vasi di wilayah	1.266.000	DKP	DIY		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
								pulau-pulau kecil DIY						pesisir dan pulau-pulau kecil DIY ke KKP					
			F. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Mutu Produk Perikanan b. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu di Perairan Umum Daratan c. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan terpadu dilaut	n/a	n/a	n/a	a. 20 dokum en b. 20 dokum en c. 2 dokum en	280.000	a. 20 dokum en b. 20 dokum en c. 2 dokum en	595.000	a. 20 dokum en b. 20 dokum en c. 2 dokum en	630.000	a. 20 dokum en b. 20 dokum en c. 2 dokum en	665.000	a. 80 dokum en b. 80 dokum en c. 8 dokum en	2.170.000	DKP	DIY

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (juta rupiah)	312.662	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	331.897
2	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	N/A	20	30	60	80	100	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang mengacu pada sasaran RPJMD ada 2 yaitu PDRB sektor Kelautan dan Perikanan serta Luas kawasan yang direhabilitasi atau konservasi. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain adanya peningkatan pendapatan PDRB sektor kelautan dan perikanan yang akan berdampak pada PDRB per kapita masyarakat nelayan dan budidaya, luas kawasan yang direhabilitasi atau dikonservasi juga meningkat.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY periode 2017 – 2022 disusun dalam suasana paralel dengan penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY dan sekaligus paralel dengan penyusunan RPJMD DIY, sehingga penyusunan renstra ini mau tidak mau harus mengikuti dinamikannya.

Dilain pihak adanya perubahan pedoman teknis dalam penyusunan renstra ini juga menjadi kendala tersendiri. Terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017 menggantikan Permendagri no 56 tahun 2010 juga mengharuskan beberapa penyesuaian format dan sistematika laporan yang ada. Namun demikian, proses panjang penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah krusial, isu strategis serta potensi besar kelautan dan perikanan DIY, sehingga bagaimanapun penyesuaiannya ke depan tidak meninggalkan pijakan dasarnya yang dikaji secara akademis.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, maka strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah DIY untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan Renstra DKP DIY ini, kami ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dan pemikirannya. Semoga kegiatan ini mampu memberikan pembelajaran bersama dan hasil yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat kelautan dan perikanan di DIY.